

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, pembangunan nasional bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kekuatan bangsa. Pembangunan nasional adalah istilah umum untuk berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diawasi bersama oleh masyarakat dan pemerintah. UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, sangat penting bagi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. UMKM, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, sangat penting bagi perekonomian negara (Sofyan, 2017). Menurut ketentuan undang-undang ini (khususnya, Bab II, Pasal 3), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Undang-undang ini menekankan bahwa UMKM hadir untuk mendorong pengembangan dan perluasan perusahaan pemiliknya dalam upaya memperkuat perekonomian nasional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Tiga elemen utama yang menjelaskan pentingnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia adalah jumlah tenaga kerja yang besar, kontribusi PDB, dan penyebarannya yang luas (Halim, 2020). UMKM memainkan peran utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM menyumbang 96,7% dari seluruh lapangan pekerjaan di Indonesia dan menyumbang 60,5% dari PDB (Limanseto, 2022). Berikut adalah tabel yang membuktikan bahwa UMKM memiliki kontribusi penting dalam PDB di Indonesia.

**Tabel 1.1 Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto tahun 2018-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Mikro</b>	<b>Kecil</b>	<b>Menengah</b>
2018	29,29%	13,56%	14,38%
2019	29,29%	13,56%	14,38%
2020	29,19%	13,49%	14,40%
2021	29,09%	13,41%	14,41%
2022	28,97%	13,34%	14,43%
<b>Total Gabungan</b>	<b>56,74%</b>		

Sumber : (Daya Qarsa, 2022)

Menurut data yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Indonesia meningkat drastis antara tahun 2015 dan 2019, dengan total 65.465.497 unit (Feriyanto, 2021). Pada kenyataannya, UMKM memainkan peran penting dalam menambah tenaga kerja, sehingga memberikan pengaruh pada pendapatan nasional secara keseluruhan (Suci, 2008). Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pelaku UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian karena kontribusinya yang besar dalam penciptaan lapangan kerja, ekspansi ekonomi, dan pengentasan kemiskinan (Sofyan, 2017).

UMKM juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan (Vinatra, 2023). Selama masa ketidakstabilan ekonomi, UMKM sering lebih mudah dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan memiliki daya tahan yang lebih baik (Mardanugraha & Akhmad, 2023). Pemerintah memiliki peran penting yang akan membantu apa yang diperlukan oleh para pelaku UMKM tersebut. Menurut Kuncoro, ada beberapa hambatan signifikan yang harus diatasi oleh UMKM untuk memperbaiki struktur ekonomi bangsa. Pertumbuhan usaha kecil dan menengah sering kali menghadapi kendala seperti pencatatan keuangan yang tidak memadai, akses informasi pemasaran yang terbatas, kurangnya pengalaman

dan pengetahuan, dan manajemen sumber daya manusia yang buruk. (Achmad Amirudin, 2019). Berbagai program dan inisiatif telah diterapkan untuk mendukung UMKM di Indonesia (Hanim & Noorman, 2018). Dalam hal ini pemerintah Indonesia memanfaatkan pengguna internet dalam memperbaiki pertumbuhan ekonomi. Menurut Basri (2002), UMKM mampu bertahan karena:

- 1) Dalam menghasilkan barang konsumsi khususnya tidak tahan lama kelompok barang ini dicirikan oleh permintaan terhadap perubahan pendapatan yang relatif rendah;
- 2) mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada non banking financing dalam aspek pendanaannya;
- 3) usaha kecil pada umumnya melakukan spesialisasi produk yang ketat dalam artian memproduksi barang tertentu;
- 4) terbentuknya UMKM sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan (Amri, 2015).

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara tradisional memiliki hambatan yang cukup besar dalam memperoleh modal, mempraktikkan proses produksi, menciptakan strategi pemasaran, mengawasi operasi mereka, dan menerapkan terobosan teknis, seperti yang ditunjukkan oleh Yustika (2005) (Fahmi, 2022).

Pada tahun 2009, 98,87% dari seluruh bisnis adalah usaha mikro, dengan perkiraan 52,2 juta unit yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Bahri dkk. (2019), kemunculan perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah mendorong perkembangan hampir 96,2 juta lapangan kerja. Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, jumlah unit UMKM yang beroperasi di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Tercatat ada 65.465.497 unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada tahun 2019. Pertumbuhan unit UMKM telah terbukti bermanfaat bagi penyerapan tenaga

kerja, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa 119.562.843 orang telah mendapatkan pekerjaan yang efektif di sektor UMKM (Yusmalina, 2023).

Jawa Timur merupakan provinsi dengan kontribusi paling signifikan terhadap perekonomian daerah di antara 38 provinsi di Indonesia. Secara khusus, sektor koperasi dan UMKM memainkan peran penting dalam menunjukkan perekonomian daerah (Achmad Amirudin, 2019). Tantangan dan potensi industri mendorong masyarakat untuk berinovasi dan berkreasi agar dapat berhasil dalam era globalisasi. Di tengah perkembangan ini, revolusi industri melalui konektivitas dan digitalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai produksi serta meningkatkan kualitas produk. Sebagai sektor usaha terkemuka di Indonesia, UMKM dituntut untuk menyesuaikan kegiatan produksi dan pemasarannya dengan perubahan zaman. Terutama dalam era digital seperti sekarang, para pelaku usaha diharapkan dapat memanfaatkan promosi online (Astuti et al., 2020).

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi diharapkan menjadi arah perubahan pola pikir masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelaksanaan UMKM. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik ini dikenal dengan nama *e-government* (Prabowo & Gamaputra, 2023). Perkembangan e-government akan memberikan potensi pasar yang signifikan bagi pertumbuhan industri teknologi informasi dan telekomunikasi, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003. Dalam rangka mendorong pertumbuhan perusahaan-perusahaan dalam negeri di sektor ini, pemerintah akan memaksimalkan pengembangan e-government. Usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menerapkan teknologi digital akan mendapatkan banyak keuntungan, termasuk peningkatan pangsa pasar, pendapatan, dan penghematan biaya (Feriyanto, 2021). Pemberlakuan Inpres No. 3 tahun 2003 merupakan langkah awal yang penting dalam penerapan e-government di Indonesia. Peraturan ini

memberikan fokus yang kuat pada bagaimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi pemerintah. Diharapkan bahwa e-government akan memfasilitasi pembentukan alur kerja yang efisien dan sistem manajemen yang terintegrasi dengan menghilangkan hambatan birokrasi. Ini memfasilitasi kolaborasi di antara berbagai lembaga pemerintah untuk merampingkan proses memperoleh informasi dan layanan. (Sosiawan, 2008).

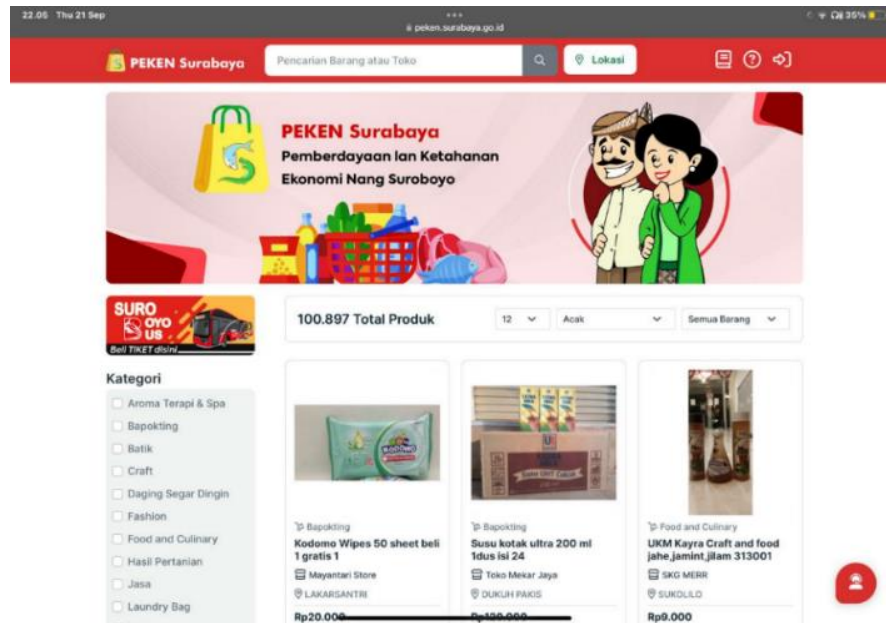
Kota Surabaya merupakan kota dengan peringkat teratas di Provinsi Jawa Timur dalam hal e-government dari semua kota dan kabupaten. Hal ini menunjukkan bagaimana inovasi layanan dapat difasilitasi oleh e-government. (Yunas, 2020). Meskipun demikian, e-government Kota Surabaya adalah yang terbaik di provinsi Jawa Timur di antara semua kota dan kabupaten, seperti yang ditunjukkan oleh indikator *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT) (Noveriyanto et al., 2018).

Ketika diterapkan dalam praktiknya, model e-government dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam konsep tersebut. Sebagai hasilnya, setiap entitas pemerintah memasukkan model hubungan e-government ke dalam operasi administratifnya, karena hal ini memiliki beberapa tujuan dan tidak hanya strategis tetapi juga memfasilitasi pencapaian berbagai target. Indarjit (2004) menguraikan empat jenis hubungan dalam penyelenggaraan e-government. Hubungan tersebut adalah pemerintah dengan bisnis (G2B), pemerintah dengan pemerintah (G2G), pemerintah dengan pegawai (G2E), dan pemerintah dengan warga (G2C). Salah satu paradigma eGovernment yang dapat digunakan dalam situasi ini adalah pemerintah-ke-bisnis. Ketika pemerintah memberikan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnis, maka terjadilah transaksi elektronik antara perusahaan dan pemerintah. Tujuan ini dapat dicapai melalui penyebaran informasi di situs web milik pemerintah dan keterlibatan dengan perusahaan komersial (Novchi et al., 2022).

Pemerintah Kota Surabaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mendorong transformasi birokrasi berbasis digital yang transparan, responsif, dan fleksibel, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Pemerintah Kota Surabaya telah menggunakan teknologi digital yang inovatif di daerahnya untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Pemerintah Kota Surabaya menciptakan aplikasi Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN) sesuai dengan Peraturan Wali Kota No. 139 Tahun 2022, yang menjelaskan tentang Daftar Inovasi Daerah. Pemerintah Kota Surabaya membuat program Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN), sebuah aplikasi layanan berbasis web dan Android, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada tanggal 31 Oktober 2021, aplikasi tersebut pertama kali dapat diakses oleh masyarakat umum. Tujuan dari peluncuran situs web E-PEKEN adalah untuk membantu Surabaya membangun kembali dan mempertahankan pembangunan ekonomi setelah wabah COVID-19 (DPM & PTSP, 2021).

Aplikasi dan situs web E-Peken dari Pemerintah Kota Surabaya mendorong toko-toko kelontong, perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pusat-pusat wisata kuliner (SWK) untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan ekonomi lokal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 07 Tahun 2021 tentang Fasilitasi, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya penjelasan Pasal 71 Huruf F tentang pemasaran barang UMKM melalui perdagangan secara elektronik atau non-elektronik menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi ini. Sebaliknya, Website E-Peken Surabaya mulai resmi dan dapat diakses oleh masyarakat umum pada tanggal 1 April 2022.

Gambar 1.1 Tampilan Awal Website E-peken



(Sumber: Website E- peken, 2023)  
[\(https://peken.surabaya.go.id/\)](https://peken.surabaya.go.id/)

Epidemi Covid-19 telah memberikan tekanan yang besar pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Hingga lima puluh persen UMKM rentan untuk beroperasi secara tidak optimal. Ada kemungkinan bahwa perekonomian Kota Surabaya akan menderita sebagai akibat dari penurunan aktivitas UMKM (Alysia, 2021). Tantangan yang akan dialami para pelaku UMKM pasca pandemic ini, terkait dengan pemulihan perekonomian serta cara mempertahankan dan menstabilkan penjualan produk. Menurut berita di *surabaya.go.id*, situs belanja milik pemerintah kota Surabaya tidak mengalami penurunan penjualan selama wabah ini.

**surabaya.go.id** - ... Antara Juli 2021 dan 26 Desember 2022 pukul 08.30 WIB, situs belanja online E-Peken Surabaya (Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo) milik Pemkot Surabaya telah melakukan total transaksi ekonomi sebesar 35.471.640.152. Karena itu, tujuan dari aplikasi web tersebut adalah untuk mendorong UMKM, Toko Kelontong, dan Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Kota Pahlawan.

Sumber : <https://surabaya.go.id/id/berita/71624/hingga-akhir-tahun-2022-transaksi->, diakses pada tanggal 2 Februari 2024

Terdapat 4.034 jenis usaha yang mendaftar dan bergabung dalam website atau aplikasi E-Peken yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2021 ini. Gunawan (2022) mendefinisikan bahwa aplikasi ini terdiri dari 2.835 UMKM, 999 toko kelontong, dan 200 SWK. Situs web E-peken Surabaya menyediakan berbagai fitur yang mudah digunakan, termasuk kemampuan pencarian produk dan toko, serta kategorisasi produk berdasarkan kecamatan. (Pemerintah Kota Surabaya, 2022d). Berikut adalah jumlah UMKM di Kota Surabaya pada tahun 2020 - 2023.

**Tabel 2.2 Jumlah UMKM Kota Surabaya pada tahun 2020 – 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah UMKM</b>
2020	4.000
2021	4.083
2022	9.911
2023	12.320

Sumber : Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Surabaya

Implementasi aplikasi E-Peken diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Di Kota Pahlawan, Pemerintah Kota Surabaya berupaya memfasilitasi transaksi antara pedagang kelontong, koperasi, konsumen, dan UMKM. (Pemerintah Kota Surabaya, 2021). Lebih lanjut, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia mengungkapkan bahwa aplikasi E-Peken yang dikembangkan Kota Surabaya saat ini layak dipertimbangkan sebagai program percontohan nasional yang menghubungkan konsumen dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Pemerintah Kota Surabaya, 2022a). Dengan adanya E-Peken, perlahan pertumbuhan perekonomian Kota Surabaya semakin meningkat dan konsep ini dapat dijadikan contoh bagi kabupaten/kota lain untuk diterapkan ketika ingin perekonomian daerahnya semakin membaik. (Kurniawan, 2022). Berikut data pengguna dari aplikasi E-Peken.

**Tabel 3.4 Data Jumlah Pengguna Aplikasi E-Peken Tahun 2023**

<b>No.</b>	<b>Pengguna</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Masyarakat Kota Surabaya	20.653
2.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Mamin	693
3.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Fashion	42



4.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Craft	23
5.	Industri Olahan Rumah Tangga	755
<b>Total Pengguna</b>		<b>22.166</b>

Sumber : Dinkominfo dan Dinkopdag Kota Surabaya, 2023

Dari data tersebut terdapat peningkatan jumlah E-Peken dari tahun 2022 ke tahun 2023, hal ini dapat diketahui bahwa pelaku UMKM mulai mempercayakan E – Peken sebagai wadah atau fasilitas dalam memasarkan produk dan menjadikan E – Peken sebagai ladang pekerjaan. Banyaknya fungsi pendukung di Website atau aplikasi E-Peken ini diperlukan untuk memudahkan transaksi antara pembeli dan penjual. Selain itu, kecenderungan pelanggan untuk membeli dan menggunakan produk dan layanan akan meningkat karena kemudahan pembelian dan penjualan secara online (Hakim, 2021). E-Peken memiliki peluang yang cukup signifikan dilihat dari omzet penghasilan pertahunnya berikut data jumlah kenaikan omzet penjualan meskipun berada di era pandemi covid-19.

**Tabel 4.5 Data Jumlah Omzet Penjualan di E-PEKEN Tahun 2021 - 2023**

No	Tahun	Jumlah Omzet Penjualan
1.	2021	Rp5.022.315.204
2.	2022	Rp45.126.667.837
3.	2023	Rp27.786.638.401
<b>Total Omzet</b>		<b>Rp77.935.621.442</b>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya,2023

Berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan di atas, E-Peken memiliki potensi untuk terus meningkatkan sektor UMKM setelah berakhirnya epidemi COVID-19, yang menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak yang baik. E-Peken telah diakui sebagai kota paling inovatif versi Innovative Government Award (IGA) 2022 (Pemerintah Kota Surabaya, 2022b). Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan untuk E – Peken, melihat persaingan *E – Commerce* lain yang bisa memberikan keuntungan yang beragam. Seperti fitur gratis ongkos kirim, harga yang ditawarkan bisa lebih murah, dan terdapat berbagai fitur yang dapat memasarkan produk. Meskipun E – Peken belum terdapat fitur – fitur seperti *E – Commerce* pada

umumnya, E – Peken memiliki keunggulan yaitu tidak memungut biaya atau pajak apapun. Sedangkan *E – Commerce* lain terdapat biaya admin yang membebankan penjual maupun pembeli. Dalam pembayaran produk aplikasi E – Peken ini hanya bisa dibayarkan melalui QRIS untuk mempermudah pembayaran menggunakan bank manapun (Prabowo & Gamaputra, 2023). Pemerintah Kota Surabaya tidak membatasi produk yang dijual di E – Peken dan tidak ada proses kurasi yang ketat. Setiap UMKM di Kota Surabaya dipersilakan untuk mendaftar dan menggunakan E-Peken untuk mempromosikan produk mereka. Hal ini diperlukan untuk memanfaatkan E-Peken karena, seperti yang dinyatakan dalam berita surabaya.go.id, E-Peken tidak memungut biaya apa pun.

Surabaya.go.id - ... E-peken ini pemkot tidak ada ambil untung, jadi situs web ini sebagai regulator untuk memfasilitasi pelaku Toko Kelontong, UMKM dan konsumen. Sehingga tidak ada dana yang dikelola e-peken

Sumber : <https://www.surabaya.go.id/id/berita/66491/transaksi-e-peken-sampai-dengan>, diakses pada tanggal 4 April 2022

Penelitian yang dilakukan oleh Alysia (2021) menunjukkan bahwa pegiat UMKM menghadapi beberapa tantangan ketika mencoba mengakses platform E-Peken selama fase implementasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus menilai perkembangan ekonomi Kota Surabaya secara konsisten setelah pemilik UMKM mengadopsi aplikasi mobile. Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan pemilik perusahaan, pertumbuhan E-Peken harus terus berlanjut. Hal ini menggarisbawahi perlunya upaya untuk meningkatkan kegunaan dan fungsi E-Peken agar dapat mendukung ekosistem bisnis UMKM secara lebih efisien. Selain itu, studi oleh Akhbari (2023) menunjukkan bahwa peran yang lebih besar untuk Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya dalam hal penyebaran informasi tentang inovasi aplikasi E-Peken diantisipasi. Hal ini akan memungkinkan pengguna aplikasi untuk tidak hanya bergantung pada

pembelian yang dilakukan oleh ASN dan OPD, tetapi juga pada kontribusi dari masyarakat Surabaya secara luas. Sejumlah masalah UMKM terkait pemahaman program berbasis aplikasi sering ditemukan, menurut penelitian tentang program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Ita Rosita (2021). Permasalahan yang dihadapi antara lain infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai serta pemahaman yang kurang baik mengenai aspek akademis dan praktis.

Hasilnya, program pemberdayaan UMKM, dan partisipasi pengguna E-Peken dalam pengembangan E-Peken yang juga harus ditingkatkan demi kenyamanan pegiat usaha dan konsumen masih memerlukan penyempurnaan. Berdasarkan konteks di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan mendapatkan perspektif yang berbeda tentang seberapa baik aplikasi E-Peken dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dengan judul **"Efektivitas Program E-Peken Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu "Bagaimana Efektivitas Program E-Peken bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk "Mengetahui Keefektifan dari Program E-PEKEN bagi UMKM Kota Surabaya".

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini:

### **1. Bagi Penulis**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- b. Diharapkan temuan penelitian ini dapat membantu para peneliti baik secara teoritis maupun praktis.

## **2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**

Temuan penelitian ini dapat menjadi informasi lebih lanjut di bidang pendidikan, membantu peneliti di masa depan yang melakukan penelitian terkait, dan menjadi tolok ukur ilmiah untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

## **3. Bagi Lembaga**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan, yang bertanggung jawab atas program pemberdayaan UMKM melalui aplikasi E-Peken, diharapkan dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan yang berguna dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Surabaya.